



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 23 April 2016

Halaman: 10

Pendataan PBB 10 Kecamatan Dilanjutkan

UMBULHARJO – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta melanjutkan program pendataan dan verifikasi ulang wajib pajak PBB di 10 kecamatan setelah pada 2015 melakukan pendataan di empat kecamatan.

“Kami anggarkan sekitar Rp2,6 miliar untuk pendataan dan verifikasi ulang wajib pajak PBB di 10 kecamatan. Pakat pekerjaan untuk pendataan sedang dalam proses lelang,” kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Balaikota Timoho, Jogja, Jumat (22/4).

Kecamatan yang akan menjadi sasaran pendataan tahun ini adalah Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Umbulharjo, Kotagede, Pakualaman, dan Gondomanan.

Seperti tahun sebelumnya,

DPDPK menggandeng pihak ketiga untuk melakukan verifikasi ulang atau sensus terhadap wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta. Jumlah total wajib pajak PBB di 10 kecamatan tercatat sekitar 63.000 wajib pajak.

“Perkiraan kebutuhan biaya untuk melakukan sensus atau verifikasi per wajib pajak adalah sekitar Rp 35.000,” kata Kadri.

Dalam sensus atau pendataan tersebut, setiap petugas akan mendatangi satu per satu wajib pajak PBB untuk melakukan verifikasi ulang.

“Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan menyangkut subjek pajak dan objek pajaknya. Apakah ada perubahan atau tidak,” katanya.

Salah satu kesulitan yang ditemui di lapangan berdasarkan pelaksanaan sensus tahun sebelumnya adalah petugas kesulitan bertemu langsung dengan wajib pajak yang tercatat dalam data.

“Biasanya, wajib pajak tidak ada di rumah atau bekerja di luar kota. Petugas hanya bertemu dengan anggota keluarga yang terkadang tidak tahu menahu mengenai pajak bumi dan bangunan,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pendataan tahun sebelumnya di empat kecamatan, Kadri mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah wajib pajak. Total jumlah wajib pajak berkisar 26.000 orang.

“Ada penambahan wajib pajak. Namun tidak terlalu banyak. Hasil pendataan ulang di lapangan sudah langsung dimasukkan dalam ketetapan PBB yang harus mereka bayarkan tahun ini,” katanya.

Pada tahun ini, Kadri juga berharap agar pendataan bisa dilakukan tepat waktu sehingga hasil verifikasi langsung bisa dimasukkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB tahun berikutnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005